

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam konteks perkembangan ekonomi di Indonesia yang terus berkembang, disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan para pelaku ekonomi yang berperan sebagai penggerak dan pelaksana. Sebagai ilmu atau profesi, akuntansi dijalankan oleh individu sebagai bagian dari masyarakat umum dengan latar belakang kebudayaan. Perkembangan akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu telah mengalami kemajuan pesat dari waktu ke waktu dan memberikan manfaat yang besar. Akuntansi dikenal sebagai sistem informasi akuntansi yang mampu mengolah data keuangan menjadi laporan atau informasi akuntansi yang diperlukan. Dengan adanya praktik akuntansi, seseorang akan lebih mudah dalam mengambil keputusan serta mencapai tujuan lainnya. Pembahasan tentang akuntansi secara umum berkaitan erat dengan penggunaan angka-angka dan perhitungan kompleks sebagai cara untuk mencatat transaksi.

Menurut Evelin (2020), perkembangan ilmu akuntansi tidak hanya digunakan sebagai pencatatan, pelaporan pada laporan keuangan, melainkan sudah merambah ke lingkup yang lebih luas. Perkembangan ilmu akuntansi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik. Sementara itu, jika kita meneliti lebih dalam terdapat begitu banyak kajian-kajian bidang akuntansi yang menarik untuk diangkat ke permukaan seperti kajian akan masyarakat madani (*civil society*). Kajian yang bisa dieksplor lebih dalam lagi

khususnya organisasi kesukuan, etnis atau mungkin budaya dari suatu masyarakat adat, dimana kajian seperti ini masih sangat jarang ditemukan. Dalam hal ini, perlu ditelusuri lebih mendalam kajian mengenai akuntansi budaya. Akuntansi budaya itu sendiri merujuk pada proses mengakuntansikan budaya yang fungsinya adalah menyajikan informasi keuangan suatu organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, budaya merupakan hasil dari aktivitas dan penciptaan batin manusia. Setiap pembentukan budaya melibatkan proses tertentu yang menceritakan alur atau siklus, memberikan setiap budaya cerita dan makna tersendiri. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa akuntansi budaya tidak hanya mencakup proses mengakuntansikan budaya, tetapi juga memperkuat akuntabilitas organisasi dalam menjaga integritas dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang esensial dan harus diterapkan di semua sektor, termasuk sektor swasta, publik, dan masyarakat sipil, dengan tujuan sebagai wujud kewajiban. Konsep akuntabilitas secara intrinsik terkait dengan mekanisme pengendalian segala aktivitas, terutama dalam hal mencapai hasil dalam pelayanan atau penyajian publik, serta menyampaikannya kepada masyarakat. Dalam konteks kajian akuntabilitas, fokusnya lebih sering diterapkan pada sektor pemerintahan dan bisnis. Sebaliknya, dalam kajian akuntabilitas *civil society*, terutama pada organisasi berbasis suku, etnis, atau adat istiadat masyarakat, masih jarang ditemukan (Panginja 2020).

Penelitian-penelitian dalam bidang akuntansi multiparadigma telah menginspirasi penulis untuk menggali lebih dalam tentang akuntansi khususnya aspek akuntabilitas biaya dalam konteks budaya salah satunya adalah upacara

adat *neku* di Flores Ngada. *Neku* adalah suatu adat istiadat yang masih dipegang erat oleh masyarakat di desa Rakateda 1 Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap penting untuk dipertahankan.

Ritual adat *neku* yang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat setempat berfungsi sebagai ungkapan kesedihan dan penghormatan terakhir kepada individu yang telah meninggal dunia. Upacara ini diadakan khusus untuk mengenang kematian orang tua (tidak diberlakukan bagi yang meninggal karena kecelakaan atau "*mata golo*"). Esensinya, upacara *neku* adalah kegiatan perpisahan bagi orang yang telah meninggal yang diadakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Upacara adat *neku* ini juga dijalankan oleh keturunan sebagai bentuk penghormatan terhadap meninggalnya orang tua mereka. Selain itu, upacara ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi biaya diperlukan untuk membeli hewan kurban, seperti kerbau dan babi. Hewan-hewan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal dunia. Selain biaya hewan, diperlukan juga dana untuk kebutuhan konsumsi seperti beras, arak, dan kebutuhan lain misalnya membeli bumbu dapur. Penggunaan biaya dan pertanggungjawaban penggunaan biaya dalam upacara adat *neku* menjadi hal yang menarik untuk diselidiki, dengan harapan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat menghindari kecurigaan, ketidakpercayaan, perselisihan pendapat, dan tidak merugikan salah satu pihak dengan harapan akan membawa keharmonisan, ketentraman, serta rasa kekeluargaan.

Dalam pelaksanaan upacara adat *neku*, setiap anggota keluarga diwajibkan untuk mengumpulkan kontribusi uang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Biaya yang dikumpulkan bersumber dari beberapa pihak, termasuk *ana tenge* (anak kandung), *ana woe* (anggota suku). Atas dasar kesepakatan bersama diputuskan bahwa salah satu anggota keluarga (bukan anak kandung) akan ditunjuk sebagai bendahara yang bertanggung jawab mengelola kontribusi tersebut. Meskipun upacara adat *neku* yang memakan biaya besar dianggap bukan sebuah beban bagi keluarga melainkan suatu bentuk keikhlasan dan adat yang harus dilaksanakan, akan tetapi akuntabilitas atau tingkat kepercayaan terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban keuanganpun tetap menjadi hal yang penting mengingat sering terjadi perselisihan pendapat maupun pertikaian yang disebabkan oleh dirugikannya pihak anak kandung (*anak tenge*) karena kondisi-kondisi yang disengaja oleh bendahara.

Berdasarkan hasil pra penelitian, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan upacara adat *neku*, kontribusi dari *ana tenge* (anak kandung) dan *one woe* (anggota suku) tercatat tanpa adanya bukti transaksi atau kwitansi. Beberapa transaksi tidak tercatat secara kronologis, dan tidak ada indikasi saldo akhir dari total kontribusi yang telah dikumpulkan oleh *ana tenge* (anak kandung) dan *one woe* (anggota suku). Oleh karena itu, dari pihak *ana tenge* (anak kandung) seringkali memberikan keluhan terkait pengeluaran uang yang tidak jelas tujuannya, dan disinyalir atas pengeluaran yang sifatnya fiktif. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan nota transaksi yang menjelaskan alasan atau keperluan dari setiap pengeluaran tersebut. Meskipun dana yang diberikan secara ikhlas dan sukarela,

namun pihak keluarga yang mempunyai acara tersebut mengalami kerugian secara ekonomi karena tidak adanya pertanggungjawaban atas biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut serta adanya biaya-biaya tambahan tak terduga yang pengeluarannya bersifat fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya dimanipulasi. Fenomena ini mendorong peneliti untuk menyelidiki tingkat akuntabilitas biaya dalam upacara adat *neku* di desa Rakateda 1 Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **Akuntabilitas Biaya Dalam Upacara Adat Neku Di Desa Rakateda 1 Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana Akuntabilitas Biaya dalam Upacara Adat Neku di Desa Rakateda 1 Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Biaya dalam Upacara Adat Neku di Desa Rakateda 1 Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa tinjauan pada pengembangan teori dan penerapan akuntabilitas biaya,

khususnya yang melibatkan aspek budaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi media atau bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan konsep akuntabilitas biaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Desa Rakateda 1 Kecamatan Golewa Barat mengenai konsep akuntabilitas biaya.